

Rencana Kerja (Renja) 2026



**BAKESBANGPOL
BANJAR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas petunjuk dan izin-Nya, dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2026 ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen pedoman terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2026, dimana Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026. Besar harapan kami agar Rencana Kerja ini dapat dipahami dan dijadikan sebagai panduan pelaksanaan oleh seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya kepada pihak-pihak yang terkait langsung pada penyusunan dan pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, sehingga segala masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk menyempurnakan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhoi segala usaha dan upaya kita dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

Martapura, 29 Juli 2025

Plt. Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banjar



H. Makmur, M.Pd

Pembina

NIP. 19730610 199802 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	45
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	45
3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	55
BAB V PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra	7
Tabel 2. 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar	26
Tabel 2. 3	Review terhadap Renstra 2026 dengan Hasil Analisis <i>Kebutuhan</i> Bakesbangpol Kabupaten Banjar	29
Tabel 3. 1	Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026	38
Tabel 4. 1	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2026	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD diartikan sebagai “Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun” (Pasal 1 Butir 11). Dalam pasal ini yang menguraikan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah disebutkan pula “Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra – SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat” (pasal 7 ayat 2).

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta

didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2026 ini payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka-Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 04);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, tanggal 24 Agustus 2021 (Lembaran Daerah Kab Banjar No 5 Thn 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kab Banjar No 5 Thn 2021);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 18) tanggal 9 Juli 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2026 ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang akan menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit kerja yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan.
2. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan.
3. Sebagai bahan masukan/landasan dalam menyusun kegiatan Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2026.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat antara lain :

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, perkiraan capaian tahun berjalan sampai dengan mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.
 - f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi penyampaian rencana kerja dan pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Adapun untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar tahun 2025-2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kewajiban untuk melaksanakan 5 (lima) program prioritas dan 1 (satu) program penunjang. Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra 2022-2026	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pokin 2025-2029	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022-2026		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025-2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Daerah s/d tahun		
				4	satuan	4	satuan		5	6	7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)
8															
8	1														
8	1	1													
8	1	1													
8	1	1	2.01												
8	1	1	2.01												
8	1	1	2.01	01											
8	1	1	2.01	02											
8	1	1	2.01	03											
8	1	1	2.01	04											
8	1	1	2.01	05											
8	1	1	2.01	06											

8	1	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Lap	99	Lap	23	17	17	100	23	63	63
8	1	1	2.01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dok	5	Dok	-	-	-	-	1	1	20
8	1	1	2.01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2	Data	5	Data	-	-	-	-	1	1	20
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SKPD yang terpenuhi		500	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	-	-	500	Persen	-	-	-	-	100	100	20
8	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131	Org/bln	173	Org/bln	25	22	22	100	27	74	56
8	1	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24	Dok	0	Dok	12	0	0	0	0	12	50
8	1	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	Dok	60	Dok	0	12	12	100	12	24	67
8	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	5	Lap	1	1	1	100	1	3	60
8	1	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	90	Lap	60	Lap	18	18	18	100	2	38	42
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi		500	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	-	-	500	Persen	-	-	-	-	100	100	100
8	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	Org	37	Org	6	5	5	100	6	17	57
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		500	Persen	500	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	10	Paket	4	4	4	100	4	12	60
8	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	Paket	20	Paket	5	4	4	100	4	13	43
8	1	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	Paket	20	Paket	6	4	4	100	4	14	47
8	1	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	60	Paket	12	12	12	100	12	36	60
8	1	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	Lap	20	Lap	11	11	11	100	4	26	47
8	1	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	60	Lap	12	12	12	100	12	36	60

8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana	500	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	500	Persen	-	-	-	-	100	100	100	100
8	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	82	Buah	220	Unit	89	56	56	100	32	177	216	216
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	500	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	500	Persen	-	-	-	-	100	100	100	100
8	1	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30	Lap	0	Lap	6	0	0	-	-	6	20	20
8	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	0	Lap	12	0	0	-	-	12	20	20
8	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Lap	60	Lap	13	12	12	100	12	37	62	62
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	500	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	500	Persen	-	-	-	-	100	100	100	100
8	1	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	5	Unit	1	1	1	100	1	3	60	60
8	1	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62	Unit	95	Unit	12	15	15	100	15	42	68	68
8	1	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	5	Unit	1	1	1	100	1	3	75	75
8	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	62	Buah	120	Unit	27	27	27	100	24	78	126	126
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran Kebangsaan	0,59	Persen	-	-	0,11	0,12	0,11	91,67	0,14	0,36	61	61
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase elemen masyarakat yang memahami Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan	-	-	500	Persen	-	-	-	-	100	100	100	100

8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	420	Persen	450	Persen	87,5	85	96,78	113,86	85	269,28	64
8	1	2	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-	-	4	Dok	-	-	-	-	1	1	25
8	1	2	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	400	Org	-	-	-	-	100	100	25
8	1	2	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1672	Org	2100	Org	420	420	420	100	420	1260	75
8	1	2	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15	Lap	20	Lap	3	3	3	100	3	9	60
8	1	2	2.01	07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	5	Dok	5	Dok	0	1	1	100	1	2	40
8	1	2	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Jumlah Paskibraka	165	Org	165	Org	0	33	33	100	33	66	40
8	1	2	2.01	09	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	5	Dok	5	Dok	0	1	1	100	1	2	40

8	1	2	2.01	10	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	5	Dok	5	Dok	0	1	1	100	1	2	40
8	1	2	2.01	11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	165	Org	165	Org	0	27	27	100	33	60	36
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik		1,69	Persen	-	-	0,41	0,23	0,14	60,87	0,41	0,96	57
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	-	-	500	Persen	-	-	-	-	100	100	20
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman politik dalam kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik.		390	Persen	0	0	90	60	100	166,67	85	275	71
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase partai politik yang memiliki rencana kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat	0	0	500	Persen					100	100	20

8	1	3	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.250	Org	8.710	Org	1600	549	549	100	2450	4599	108
8	1	3	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	845	Org	1800	Org	125	247	247	100	360	732	87
8	1	3	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20	Lap	20	Lap	4	4	4	100	4	12	60
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang dibina		132	Persen	-	-	29,82	30	30	100	31	90,82	69
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang aktif melaporkan keberadaannya	-	-	20	Persen	-	-	-	-	4	4	20
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terlaksana		407	Persen	-	-	66,66	80	100	125	82	248,66	61
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)	-	-	300	Persen	-	-	-	-	50	50	17

8	1	4	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.638	Org	2.000	Org	210	55	55	100	400	665	41
8	1	4	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	140	Org	-	-	35	-	-	-	0	35	25
8	1	4	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4	Lap	-	-	-	-	-	-	1	1	25
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase fasilitasi kegiatan P4GN dan FKUB yang terlaksana		500	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			-	-	500	Persen	-	-	-	-	100	100	20
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terlaksana		340	Persen	-	-	71,42	70	85,71	122,44	70	227,13	67
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			-	-	450	Persen	-	-	-	-	80	80	18
								-	-	470	Persen	-	-	-	-	90	90	19
8	1	5	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			-	-	4	Dok	-	-	-	-	-	-	-
8	1	5	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5.220	Org	10.200	Org	1138	1328	1278	96,23	2450	4866	93

8	1	5	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	400	Org	-	-	-	-	-	-	
8	1	5	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	5	Lap	-	-	-	-	1	1	20
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik sosial		500	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase potensi konflik sosial yang dapat diselesaikan	-	-	500	Persen	0	0	0	0	100	100	20
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase jumlah kebijakan teknis terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terlaksana		440	Persen	-	-	85,71	90	85,71	95,23	90	261,42	59
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	-	-	500	Persen	-	-	-	-	100	100	20
							Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	-	-	500	Persen	-	-	-	-	100	100	20
8	1	6	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.650	Org	8.175	Org	980	1900	1900	100	1635	4515	274

8	1	6	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20	Lap	20	Lap	4	4	4	100	4	12	60
8	1	6	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	30	Lap	30	Dok	6	6	6	100	6	18	60

Sumber : Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026
Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029

Sejatinya bab II ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), dengan mengacu pada APBD tahun berjalan, yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Adapun terkait penyampaian realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target, yang telah memenuhi target, dan yang melebihi target kinerja diambil dari capaian kinerja program dan kegiatan sampai akhir tahun 2024 sebagaimana uraian dibawah :

a. Program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penduduk yang mendapat pembinaan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan dengan target 0,12 persen adapun realisasinya sebesar 0,11 persen sehingga persentase capaiannya adalah 91,67 persen.

- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik dengan target 0,23 persen adapun realisasinya sebesar 0,14 persen sehingga persentase capaiannya adalah 60,87 persen.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase jumlah kebijakan teknis terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terlaksana dengan target 90 persen adapun realisasinya sebesar 85,71 persen sehingga persentase capaiannya adalah 95,23 persen.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan target 1328 orang adapun realisasinya sebesar 1278 orang sehingga persentasenya adalah 96,23 persen.

b. Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Indikator kinerja pada program ini adalah persentase ormas yang dibina dengan target 30 persen adapun realisasinya sebesar 30 persen sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Indikator kinerja pada program ini adalah persentase fasilitasi kegiatan P4GN dan FKUB yang terlaksana dengan target 100 persen adapun realisasinya sebesar 100 persen sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penanganan konflik sosial dengan target 100 persen adapun realisasinya sebesar 100 persen sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang disusun dengan target 100 persen adapun realisasinya sebesar 100 persen sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi dengan

target 100 persen adapun realisasinya sebesar 100 persen sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi dengan target 100 persen adapun realisasinya sebesar 100 persen sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi dengan target 100 persen adapun realisasinya sebesar 100 persen sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase pengadaan BMD penunjang urusan daerah dengan target 100 persen adapun realisasinya sebesar 100 persen sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dengan target 100 persen adapun realisasinya sebesar 100 persen sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah dengan target 100 persen adapun realisasinya sebesar 100 persen sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target 7 dokumen adapun realisasinya sebesar 7 dokumen sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan target 3 dokumen adapun realisasinya sebesar 3 dokumen sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan target 1 dokumen adapun realisasinya sebesar 1 dokumen sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dengan target 1 dokumen adapun realisasinya sebesar 1 dokumen sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dengan target 2 laporan adapun realisasinya sebesar 2 laporan sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 17 laporan adapun realisasinya sebesar 17 laporan sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 22 orang adapun realisasinya sebesar 22 orang sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 12 dokumen adapun realisasinya sebesar 12 dokumen sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan target 1 laporan adapun realisasinya sebesar 1 laporan sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dengan target 18 laporan adapun realisasinya sebesar 18 laporan sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan target 5 orang adapun realisasinya sebesar 5 orang sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target 4 paket adapun realisasinya sebesar 4 paket sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 4 paket adapun realisasinya sebesar 4 paket sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan target 4 paket adapun realisasinya sebesar 4 paket sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan dengan target 12 paket adapun realisasinya sebesar 12 paket sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan target 11 laporan adapun realisasinya sebesar 11 laporan sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 12 laporan adapun realisasinya sebesar 12 laporan sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan dengan target 56 unit adapun realisasinya sebesar 56 unit sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 12 laporan adapun realisasinya sebesar 12 laporan sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara

dan dibayarkan pajaknya dengan target 1 unit adapun realisasinya sebesar 1 unit sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 15 unit adapun realisasinya sebesar 15 unit sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

Indikator kinerja adalah sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 1 unit adapun realisasinya sebesar 1 unit sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

Indikator kinerja adalah sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara dengan target 27 unit adapun realisasinya sebesar 27 unit sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, karakter Bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan dengan target 420 orang adapun realisasinya sebesar 420 orang sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, karakter Bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan target 3 laporan adapun realisasinya sebesar 3 laporan sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purnapaskibraka dengan target 1 dokumen adapun realisasinya sebesar 1 dokumen sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah paskibraka dengan target 33 orang adapun realisasinya sebesar 33 orang sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah laporan hasil pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila dengan target 1 dokumen adapun realisasinya sebesar 1 dokumen sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah laporan hasil pelaksanaan tugas purnapaskibraka duta pancasila dengan target 1 dokumen adapun realisasinya sebesar 1 dokumen sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah purnapaskibraka duta pancasila target 27 orang adapun realisasinya sebesar 27 orang sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah dengan target 549 orang adapun realisasinya 549 orang sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah dengan target 247 orang adapun realisasinya 247 orang sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah dengan target 4 laporan adapun realisasinya 4 laporan sehingga persentasenya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah dengan target 55 orang adapun realisasinya 55 orang sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan target 1900 orang adapun realisasinya 1900 orang sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan target 4 laporan adapun realisasinya 4 laporan sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah

kabupaten/kota dengan target 6 dokumen adapun realisasinya 6 dokumen sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.

c. Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja pada program ini adalah Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesbangpol adalah nilai indeks sebesar 76 poin dan nilai capaian yang diterima Badan Kesbangpol pada penilaian IKKI tahun 2024 adalah sebesar 84,85 poin yang artinya persentase capaian pada program ini adalah sebesar 111,64 persen.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dengan target 85 persen, dengan realisasi capaian sebesar 96,78 persen sehingga persentase capaiannya sebesar 113,86 persen

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman politik dalam kegiatan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik dan etika budaya politik dengan target 60 persen adapun capaiannya adalah 100 persen sehingga persentase capaiannya sebesar 166,67 persen.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang

pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang terlaksana dengan target 80 persen adapun capaiannya adalah 100 persen sehingga persentase capaiannya sebesar 125 persen.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang terlaksana dengan target 70 persen adapun capaiannya adalah 85,71 persen sehingga persentase capaiannya sebesar 122,44 persen.
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dimana targetnya sebanyak 7 dokumen sedangkan capaiannya sampai akhir tahun tersusun 8 buah dokumen yang artinya capaiannya melebihi target yang ditetapkan, dimana persentasenya sebesar 114 persen.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya maupun melebihinya dari target kinerja program/kegiatan

1. Tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

- Dana yang tersedia tidak mencukupi untuk menjangkau lebih banyak peserta pembinaan
- Kurangnya tenaga ahli dalam analisis dan perumusan kebijakan teknis.
- Karena anggaran tidak tersedia sesuai arus kas, beberapa kegiatan mungkin mengalami penundaan atau perubahan jadwal, sehingga jumlah peserta yang bisa dijangkau berkurang.

2. Terpenuhinya maupun melebihinya dari target kinerja program/kegiatan

- Pelaksana kegiatan memiliki perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.
- Adanya koordinasi dan pemahaman tugas yang bagus dalam pelaksanaan program/kegiatan, hingga pelaksanaannya bisa

terarah dan relevan antara target dan pagu anggaran yang tersedia.

- Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung yang selaras dengan usaha pencapaian target masing masing kegiatan.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD. Tahun 2026 adalah tahun kedua pelaksanaan dokumen Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029, dimana pada akhir tahun 2025 telah ditetapkan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 karena adanya visi dan misi Bupati Kabupaten Banjar yang baru.
- f. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan dan tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi beberapa faktor diatas antara lain :

1. Sangat diharapkan agar setiap pelaksana kegiatan atau penyusun rencana kegiatan mengetahui dan memahami dengan jelas dan detil terkait dasar dan tujuan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga pada saat membuat atau menentukan indikator dan target kinerjanya bisa tepat, akurat dan rasional yang kedepannya akan mempermudah disaat proses penjabaran kedalam kegiatan (penyusunan rincian belanja), dimana kondisi yang ada masih ada penyusun rencana kegiatan yang kurang memahami dasar dan tujuan dari kegiatan yang ditanganinya sehingga pada saat menentukan indikator, target maupun rincian belanjanya banyak yang tidak tepat dan tidak akurat, yang pastinya akan berdampak sulitnya mencapai/merealisasi target kinerja yang telah ditentukan diawal. Salah satu langkah yang bisa diambil terkait hal ini adalah meningkatkan pemahaman atau wawasan para penyusun perencanaan (penyusun kegiatan di bidang khususnya) agar aktif mempelajari tugas pokok, fungsi, dan tugas khusus lainnya yang diemban oleh bidangnya, serta agar diberi kesempatan mengikuti bimtek/sosialisasi yang terkait perencanaan kegiatan, supaya pada akhirnya mereka bisa menjadi penyusun rencana kegiatan yang berkualitas yang menguasai dan memahami kondisi serta keadaan bidang kerjanya, dan bisa merumuskan dan menterjemahkan kegiatan kedalam dokumen perencanaan secara baik dan akurat,

yang mampu menetapkan target secara realistis dan berpandangan visioner.

2. Perlu ada komitmen yang kuat dari bidang sebagai pelaksana kegiatan, agar saat proses penyusunan dokumen perencanaan yang sifatnya turunan mereka tetap berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada di atasnya dan tetap berkesinambungan dalam menetapkan target capaian kinerja.
3. Perlu ada jaminan kepastian dalam penetapan/pemberian pagu anggaran kepada SKPD, sering terjadi keadaan di SKPD dimana target kinerja dan anggaran dalam suatu dokumen berbeda dengan target dalam dokumen turunannya, seperti target indikator kinerja dan anggaran yang ditetapkan dalam Renja berbeda dari target Renstra, atau target dalam RKA berbeda dari Renja, atau bisa juga target RKA berbeda dengan DPA, karena ternyata pagu anggaran yang dikucurkan pada SKPD oleh Pemerintah Kabupaten jauh lebih kecil dari pagu yang diminta atau ditargetkan oleh SKPD, sehingga mau tidak mau perlu ada pengurangan target dan anggaran dalam penyusunan program dan kegiatan. Namun harus diakui sulit memang untuk mendapatkan kepastian dalam hal ini karena sangat terkait dengan adanya peningkatan atau penurunan pendapatan dan belanja dalam APBD tahun berjalan.

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan, dan kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar juga tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sehingga untuk menilai kinerja pelayanan perangkat daerah Badan Kesbangpol dihitung berdasar capaian indikator program sebagaimana dicantumkan dalam tabel dibawah :

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)		
1	Indikator Kinerja Program Renstra 2022-2026	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran Kebangsaan	-	-	0,12%	0,14%	0,16%	-	0,11%	-	0,16%	-	
2		Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik	-	-	0,23 %	0,41%	0,41%	-	0,14%	-	0,41%	-	
3		Persentase Ormas yang dibina	-	-	30%	31%	32%	-	30%	-	32%	-	
4		Persentase fasilitasi kegiatan P4GN dan FKUB yang terlaksana	-	-	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-	
5		Persentase Penanganan Konflik Sosial.	-	-	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-	
6		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesbangpol	-	-	76	78	78	-	84,85	-	78	-	
7	Indikator Kinerja Program 2025-2029	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
8		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	-	-	-	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
9		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	-	-	-	40%	41%	42%	31.3%	31.3%	41%	42%	
10		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang di laksanakan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

11	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Nilai IKKI	-	-	-	80	84.90	84.95	84.85	-	84.95	84.85

3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis yang menjadi dasar atau acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2021-2026) adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mencegah dan mendeteksi dini terhadap semua potensi konflik di daerah
2. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara maksimal dalam rangka memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
4. Meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
5. Meningkatkan pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik di masyarakat.
6. Peningkatan peran daerah dalam mendukung upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Tabel 2. 3 Review terhadap Renstra 2026 dengan Hasil Analisis Kebutuhan Bakesbangpol Kabupaten Banjar

No	Renja 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Kebutuhan Dana	
	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	
1	Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKKI	80	6.131.861.200	Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKKI	84.90	6.050.763.800,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	66.850.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	60.970.800,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	6.600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	5.683.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	3.206.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	2.806.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	3.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	4.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	3.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	4.500.000,00	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpol	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Lap	8.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpol	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Lap	16.170.000,00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dok	12.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dok	9.861.000,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kesbangpol	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	17.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kesbangpol	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	12.244.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.344.433.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.292.133.000,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Org/bln	4.129.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Org/bln	4.129.000.000,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	209.040.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	157.440.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	5.884.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	4.328.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Lap	509.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Lap	1.365.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100%	70.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100%	50.000.000,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Org	70.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Org	50.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	100%	634.501.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	100%	672.105.000,00	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Pkt	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Pkt	4.910.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Pkt	19.501.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Pkt	19.233.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Pkt	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Pkt	30.995.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Pkt	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Pkt	14.811.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kesbangpol	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Lap	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kesbangpol	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Lap	9.996.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	550.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	592.160.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100%	254.980.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100%	186.140.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit	254.980.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit	186.140.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas	100%	404.597.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas	100%	376.625.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	404.597.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	376.625.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	100%	356.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	100%	412.790.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.750.000,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	249.120.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99.960.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	21.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	20.960.000,00	
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase elemen masyarakat yang memahami Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan	100%	2.185.035.100	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%	1.331.454.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	85%	2.185.035.100	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	82%	1.331.454.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dok	100.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dok	45.000.000,00	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Org	270.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	190 Org	27.932.000,00	

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	420 Org	270.161.500	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	240 Org	55.864.000,00	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Lap	5.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Lap	2.800.000,00	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kesbangpol	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dok	212.370.400	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kesbangpol	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dok	194.232.000,00	
	Pembentukan Paskibraka	Kesbangpol	Jumlah Paskibraka	33 Org	1.123.881.000	Pembentukan Paskibraka	Kesbangpol	Jumlah Paskibraka	33 Org	862.268.000,00	
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kesbangpol	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dok	82.788.200	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kesbangpol	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dok	56.122.000,00	
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kesbangpol	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dok	59.484.800	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kesbangpol	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dok	59.940.000,00	
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kesbangpol	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	33 Org	61.349.200	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kesbangpol	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	33 Org	27.296.000,00	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100%	5.151.205.000	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	4.973.485.000,00	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase partai politik yang memiliki rencana kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat	100%	5.151.205.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pendidikan Politik yang terlaksana	100%	4.973.485.000,00	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	680 Org	5.033.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400 Org	4.923.152.000,00	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	360 Org	43.192.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	320 Org	29.425.000,00	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Lap	75.013.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Lap	20.908.000,00	

4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Ormas yang aktif melaporkan keberadaannya	4%	570.502.900	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	41%	274.447.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)	55%	570.502.900	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)	91,2%	274.447.000,00	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400 Org	570.502.900	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400 Org	274.447.000,00	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Persentase potensi konflik agama, ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dicegah	100%	1.442.998.500	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang di laksanakan	100%	2.315.207.600,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	85%	1.442.998.500	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	82%	2.315.207.600,00	
			Persentase Rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti	90%				Persentase Rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti	100%		
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dok	200.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dok	29.508.000,00		

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.450 Org	1.037.998.500	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1630 Org	1.893.914.000,00	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Org	100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	800 Org	357.315.600,00	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Lap	105.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Lap	34.470.000,00	
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi konflik sosial yang dapat diselesaikan	100%	2.850.088.000	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi konflik sosial yang diselesaikan	100%	1.341.320.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100%	2.850.088.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	100%	1.341.320.000,00	
			Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	100%				Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	100%		

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Lap	50.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Lap	44.974.000,00	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dok	550.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dok	384.885.500,00	

Sumber : Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati dalam hal merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesatuan bangsa dan politik, meliputi ketahanan ideologi dan kewaspadaan daerah, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan Bangsa dan Negara khususnya di wilayah Kabupaten Banjar dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat NKRI dan meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

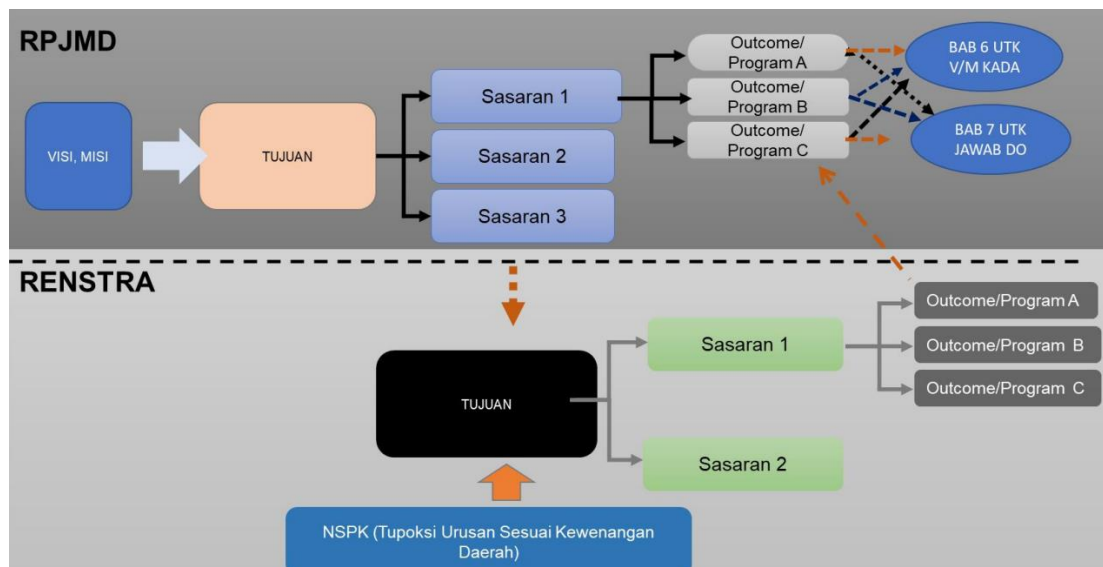
3.2.1 Tujuan Renstra Bakesbangpol Tahun 2025 - 2029

Tujuan organisasi pada dasarnya jangka panjang, yang harus diselesaikan selama waktu itu, dan akan mengarahkan kinerja

tahunan organisasi. Tujuan mencerminkan pernyataan kondisi yang diinginkan dan bukan merupakan proses atau aktivitas.

Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar ditetapkan berdasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah serta Sasaran pada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025 – 2029 sehingga terdapat keterkaitan antara Sasaran RPJMD Kabupaten Banjar dengan tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.

Gambar 3.1.1. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Bakesbangpol



Untuk merealisasikan visi dan misi sebagaimana terdapat dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029, perlu ditetapkan tujuan Bakesbangpol Kabupaten Banjar (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan

perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2025 - 2029 adalah:

**“ Meningkatkan Harmoni Sosial dan Penguatan Nilai-Nilai
Demokrasi “**

Untuk mencapai tujuan Bakesbangpol Kabupaten Banjar pada akhir Renstra periode 2025-2029 sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Tujuan, yaitu sebagai berikut:

“Indeks Harmoni Indonesia”

dan

“Indeks Kewaspadaan Nasional”

3.2. Sasaran Renstra Bakesbangpol Tahun 2025 - 2029

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan.

Sasaran juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi

sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), nyata (*Relevant*) dan tepat waktu (*Time Bound*). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Bakesbangpol Kabupaten Banjar selama kurun tahun 2025-2029 adalah :

- 1. Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di daerah**
- 2. Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, perlu ditetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, dimana target kinerja tersebut harus bergerak naik secara linier dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Dengan adanya peningkatan target kinerja tersebut, secara tidak langsung akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas program, serta akuntabilitas kinerja Bakesbangpol Kabupaten Banjar. Hal ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menuntut instansi pemerintah untuk bekerja lebih adaptif, transparan, dan berbasis hasil (*outcome-based*). Oleh karena itu, pencapaian sasaran ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam membangun masyarakat yang aktif, toleran, serta memiliki ketahanan ideologi dan semangat kebangsaan yang kuat. Adapun indikator sasaran yang akan dicapai tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Indeks Demokrasi Indonesia**
- 2. Indeks Kinerja Ormas**
- 3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Adapun penetapan target tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2025 – 2030 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bakesbangpol

Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra PD												
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
UU 23 TAHUN 2014 (NSPK):	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi		Indeks Harmoni Indonesia	NA	6,00	6,10	6,20	6,30	6,40	6,50		
			Indeks Kewaspadaan Nasional	85.13	85.33	85.53	85.73	85.93	86.13	86.33		
a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;		Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	NA	80.15	80.3	80.45	80.6	80.75	81		
b. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;			Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	NA	72	74,5	76	78	80	81	
c. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.												
d. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila												
Sasaran RPJMD yang relevan :	Meningkatnya harmoni sosial dan pemajuan kebudayaan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.14	78.25	78.75	79.25	79.50	80	80.50		

Sumber : Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tidak terlepas dari Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2026 mencakup 6 program dengan 12 kegiatan yang meliputi 49 sub kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,

Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Sub Kegiatan Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
 - Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka
 - Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
 - Sub Kegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Pencegahan Konflik di Daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (*planning*), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (*action*), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Tanpa pendanaan, semua itu akan sia-sia. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKKAB. BANJAR

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik					16.286.677.400,00						19.739.150.000,00				
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					16.286.677.400,00						19.739.150.000,00				
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					16.286.677.400,00						19.739.150.000,00				
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-			84,90 Nilai	6.050.763.800,00						-	7.101.150.000,00		
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	-			100 persen	60.970.800,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	-	69.600.000,00		
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	5.683.800,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah		7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															

						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.206.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah		2.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2.806.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah		5.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah		5.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah		6.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19 Laporan	16.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah		8.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah												
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			1 Dokumen	9.861.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah		12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah												
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			1 Data	12.244.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah		17.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	-	100 persen	4.292.133.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-	-	5.106.000.000,00	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			31 Orang/bulan	4.129.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-		4.849.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	157.440.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.328.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-		6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	1.365.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-		1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	-			100 persen	50.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-	-	80.000.000,00	
	8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	50.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	-			100 persen	672.105.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-	-	696.500.000,00	
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-		5.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	19.233.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-		20.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-		40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	14.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			4 Laporan	9.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-		10.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	592.160.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	-		100 persen	186.140.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-	-	278.550.000,00	
8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			38 Unit	186.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-		278.550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas	-		100 Persen	376.625.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Karyawan Honoror (PTT)	-	450.000.000,00	
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	376.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Karyawan Honoror (PTT)		450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	-		100 persen	412.790.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-	-	420.500.000,00	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	42.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-		50.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	249.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	99.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-		45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	20.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	-		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	-		100 Persen	1.331.454.000,00						-	2.333.000.000,00	

8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	-			82 Persen	1.331.454.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat	-	2.333.000.000,00	
8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
						Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				190 Orang	27.932.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				240 Orang	55.864.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				3 Laporan	2.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														

						Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	194.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka													
						Jumlah Paskibraka				33 Orang	862.268.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		1.150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila													
						Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	56.122.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila													
						Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	59.940.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila													
						Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				33 Orang	27.296.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		62.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	-			100 Persen	4.973.485.000,00						-	5.224.000.000,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pendidikan Politik yang terlaksana	-			100 Persen	4.973.485.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat	-	5.224.000.000,00	
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					400 Orang	4.923.152.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		5.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					320 Orang	29.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		44.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			4 Laporan	20.908.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	-		41 Porsen	274.447.000,00						-	578.000.000,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)	-		91,2 Porsen	274.447.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat	-	578.000.000,00	
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			400 Orang	274.447.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		578.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang di laksanakan	-		100 Porsen	2.315.207.600,00						-	1.551.000.000,00	

8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemahaman Masyarakat dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Rekomendasi FKUB dan Pencegahan Konflik yang ditindak lanjuti	-			82 Persen 100 Persen	2.315.207.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat	-	1.551.000.000,00	
8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
						Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	29.508.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		202.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1630 Orang	1.893.914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		1.039.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			800 Orang	357.315.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			1 Laporan	34.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	-		100 Persen	1.341.320.000,00						-	2.952.000.000,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen Persentase penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	-		100 Persen 100 Persen	1.341.320.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat	-	2.952.000.000,00	
	8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			1 Dokumen	9.904.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		160.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
						Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun					1 Dokumen	7.702.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		210.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
						Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					1500 Orang	534.101.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		1.650.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					135 Orang	359.752.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		320.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					4 Laporan	44.974.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														

						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			4 Dokumen	384.885.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4. Penguatan perlindungan sosial	Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/ Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat	552.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
									J U M L A H	16.286.677.400,00						19.739.150.000,00	

Sumber : SIPD Kementerian dalam Negeri

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Banjar serta target dan sasaran pembangunan yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2026.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergitas serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Martapura, 29 Juli 2025

Plt. Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banjar



H. Makmur, M.Pd

Pembina

NIP. 19730610 199802 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. A. Yani Km. 40 Gedung Berintan Lt. III Telp/Fax (0511) 4721113
Martapura Kodepos 70611 Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANJAR

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, tanggal 24 Agustus 2021 (Lembaran Daerah Kab Banjar No 5 Thn 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kab Banjar No 5 Thn 2021);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANJAR.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun RENJA Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Penanggungjawab
 - a. Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar;
 - b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar;
2. Ketua
 - a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun;
 - b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten banjar Tahun;
 - c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Renja Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar;

3. Sekretaris

- a. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar;
- b. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Renja Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar;
- c. Merumuskan kegiatan prioritas Renja Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar;
- d. Menghimpun data, usulan program kegiatan dan usulan anggaran dari masing-masing bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2026;

4. Anggota

- a. Menyampaikan data, usulan program kegiatan dan usulan anggaran;
- b. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Tugas-tugas lainnya yang diperlukan dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 10 Februari 2025



Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Banjar,

[Handwritten Signature]
Drs. Wasis Nugraha
Pembina Tingkat I
NIP. 19700925 199101 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANJAR TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN
2026 BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BANJAR
Nomor : 15 Tahun 2025
Tanggal : 10 Februari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANJAR TAHUN

No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala Badan	Penanggungjawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kasubbag Perencanaan	Sekretaris
4.	Anggota	1. Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama 2. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 3. Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 10 Februari 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Banjar,



Drs. Wasis Nugraha
Pembina Tingka I
NIP. 19700925 199101 1 001